

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA PERMUKIMAN KUMUH DAERAH PERKOTAAN DI INDONESIA (SEBUAH STUDI LITERATUR)

**DIKA ARDIANA FITRI**

Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[dikaardianaf.ddk@gmail.com](mailto:dikaardianaf.ddk@gmail.com)

**Dra. Sulistinah, M.Pd**

Dosen Pembimbing Mahasiswa

### Abstrak

Kota sebagai wadah konsentrasi penduduk serta berbagai kegiatan yang ada di dalamnya tumbuh dan berkembang semakin cepat dan luas seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tinggi setiap tahunnya. Keterbatasan lahan serta keterbatasan ekonomi mengakibatkan masyarakat membangun rumah di tempat yang sempit bahkan *illegal* sehingga pertumbuhan kawasan permukiman menjadi tidak terkendali yang mengakibatkan munculnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan suatu daerah permukiman yang telah terjadi penurunan kualitas lingkungan dengan kondisi rumah masyarakat tersebut tidak layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor fisik dan faktor sosial budaya penyebab munculnya permukiman kumuh daerah perkotaan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan buku teks, jurnal, dan periodical. Analisis data dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, mengutip informasi, mencatat, menyimpulkan serta melakukan interpretasi atas hasil yang diperoleh melalui bahan kajian yang relevan. Faktor-faktor yang menjadi objek penelitian diantaranya adalah faktor fisik yang terdiri dari kondisi kepadatan bangunan, kondisi drainase, jaringan air limbah, jaringan air bersih, jaringan jalan, dan persampahan. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor sosial, ekonomi dan budaya yang terdiri dari tingkat pendidikan, migrasi masuk, pendapatan, jenis pekerjaan, jumlah beban tanggungan, dan *extended family system*.

Hasil yang telah diperoleh dari telaah studi literature menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab munculnya permukiman kumuh dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yakni faktor fisik yang terdiri dari kondisi kepadatan bangunan, kondisi drainase, jaringan air limbah, jaringan air bersih, jaringan jalan serta persampahan. Faktor ke dua adalah faktor sosial, ekonomi dan budaya yang terdiri dari tingkat pendidikan, migrasi masuk, pendapatan, jenis pekerjaan, jumlah beban tanggungan, dan *extended family system*.

**Kata Kunci:** permukiman kumuh, faktor penyebab, perkotaan

### Abstract

Cities as a place for population concentration and various activities in them grow and develop faster and wider in line with the increasing number of high population each year. Limited land and economic constraints have resulted in the community building houses in narrow and even illegal places so that the growth of residential areas becomes uncontrolled which results in the emergence of slums. A slum is a residential area where environmental quality has deteriorated with the condition of the community's house being unfit for habitation. The purpose of this study is to determine the physical and socio-cultural factors that cause the emergence of urban slum settlements in Indonesia.

This research is a literature study. The data used comes from secondary data. Data collection methods use textbooks, journals, and periodicals. Data analysis was carried out by reading, collecting, quoting information, taking notes, concluding and interpreting the results obtained through relevant study materials. The factors that become the object of research include physical factors consisting of conditions of building density, drainage conditions, wastewater networks, clean water networks, road networks, and solid waste. The next factors are social, economic and cultural factors which consist of education level, in-migration, income, type of work, total dependency burden, and extended family system.

The results obtained from the review of literature studies show that the factors causing the emergence of slum settlements can be grouped into two factors, namely physical factors consisting of conditions of building density, drainage conditions, wastewater networks, clean water networks, road networks and solid waste. The second factor is social, economic and cultural factors which consist of education level, in-migration, income, type of work, total dependency burden, and extended family system.

**Keywords:** slum settlements, causative factors, urban

## PENDAHULUAN

Kota sebagai wadah konsentrasi penduduk serta berbagai kegiatan perkotaannya tumbuh dan berkembang semakin cepat dan luas seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tinggi setiap tahunnya. Berkaitan akan hal tersebut terdapat berbagai macam penyebab yang menjadi faktor pendorong adanya laju pertumbuhan penduduk, yakni peningkatan jumlah penduduk berdasarkan natalitas maupun perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2015, tingkat urbanisasi di Indonesia mencapai 53,3% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 56,7% dan diproyeksikan akan meningkat sebesar 60,0% pada tahun 2025. Bertambahnya jumlah penduduk secara tidak terkendali dan terkonsentrasinya penduduk di daerah perkotaan menjadi konsekuensi dari hal tersebut.

Fenomena tersebut akan terus berlanjut saat masih adanya faktor pendorong yakni kehidupan yang sulit di desa maupun faktor penarik yakni kehidupan yang lebih baik di kota. Pesatnya perkembangan kota dengan segala aktivitasnya menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat desa untuk berbondong-bondong bermigrasi masuk ke daerah perkotaan. Hasil proyeksi survey Bapennas 2010, sekitar 120 juta atau hampir sekitar 50% masyarakat Indonesia bertempat tinggal di kota dan diprediksi meningkat pada tahun 2025 menjadi 67,7%.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus menerus bertambah maka permintaan lahan untuk bermukim juga akan semakin meningkat, sementara luas lahan perkotaan tetap. Konsekuensi yang harus diterima adalah harga lahan semakin tinggi. Lahan-lahan sempit sekalipun bahkan lahan-lahan *illegal*, yang seharusnya tidak layak di peruntukkan sebagai lahan permukiman menjadi alternatif bagi masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah untuk mendirikan rumah sebagai tempat tinggal, terutama bagi masyarakat migran yang datang ke kota hanya sekedar untuk mengadu nasib tanpa dibekali dengan *skill* yang mumpuni.

Keterbatasan akan ruang membawa konsekuensi logis terhadap perkembangan permukiman, yang berarti bahwa perluasan wilayah yang berupa alih fungsi lahan menjadi permukiman. Semua ruang perkotaan telah terisi ruang permukiman dan berlangsung secara terus menerus maka akan terjadi pemadatan bangunan (*densifikasi*) (Rindarjono, 2012:2). Pemadatan bangunan merupakan salah satu bentuk dari perkembangan permukiman yang negatif yang selanjutnya dapat memicu adanya *deteriorisasi* lingkungan permukiman. Daerah perkotaan akan muncul kawasan yang tidak layak huni dan sangat padat, fenomena ini akan menjadikan keadaan suatu

kawasan semakin buruk, biasa dikenal dengan permukiman kumuh.

Permukiman kumuh yaitu permukiman yang tak sesuai menjadi tempat hunian dikarenakan bangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, mutu dari sarana dan prasarana tidak memadai. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 tahun 2016). Menurut Rindarjono (2012:65), permukiman kumuh adalah permukiman dengan kondisi tempat tinggal dikawasan tersebut tidak layak. Kepadatan bangunan tinggi, kebutuhan sarana air bersih yang kurang memadai, sanitasi dan sarana jalan yang buruk, ruang terbuka yang hampir tidak ada, serta kelengkapan sarana sosial yang tidak mendukung.

Permukiman kumuh juga dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik antara lain kepadatan penduduknya yang tinggi > 1.250 jiwa/H, tata letak sangat tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi mencapai 250 atau lebih perhektarnya, bentuk rumah yang sempit, sanitasi buruk serta kualitas bangunan yang jelek dan rusak (Rindarjono, 2012:27). Ciri lain dari permukiman kumuh juga berasosiasi dengan kawasan perindustrian, disamping rel kereta api, dekat dengan sentral kegiatan, dan daerah perairan (Socik, 1993 dalam Rindarjono, 2012:27). Ciri-ciri non fisik permukiman kumuh diantaranya adalah jenis pekerjaan penghuninya yang sebagian besar bekerja di sektor informal dengan tingkat penghasilan rendah, jumlah anggota keluarga yang relatif banyak (Yeh, 1979 dalam Rindarjono 2012:28).

Keberadaan permukiman kumuh akan berdampak besar terhadap kondisi dan perkembangan suatu perkotaan. Kemunduran kualitas lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya ditimbulkan dari adanya permukiman kumuh. Pemerintah juga akan kehilangan kendali terhadap penduduk perkotaan terutama di kawasan kumuh yang berpotensi terhadap peningkatan kejahatan dan penyakit. Permasalahan di atas tentunya dapat menyebabkan penurunan citra perkotaan tersebut. Dampak dari adanya permukiman kumuh ini juga tentunya akan sangat erat hubungannya dengan pembangunan kota di masa yang akan mendatang.

Kota diartikan sebagai organisme yang kompleks dan sistematis, yang terdiri dari tempat atau ruang secara fisik dan segala bentuk aktivitas kehidupan dan tatanan sosial, budaya, ekonomi, masyarakat, serta keterkaitan antar keduanya (Wibisono, 2010 dalam Prayitno, 2014:26). Perkotaan (urban) merupakan area terbangun yang sudah memiliki struktur perkotaannya atau sebagai suatu permukiman penduduk yang terpusat pada suatu area dengan tingkat kepadatan yang tinggi, beserta berbagai kegiatan perkotaan yang membutuhkan fasilitas pelayanan pendukung yang lengkap. Kawasan kumuh selalu dipandang sebagai kawasan marginal dan *squatter*

dalam perspektif perkotaan. Kawasan ini terkesan mengganggu perkembangan Kota yang lebih fokus pada sektor ekonomi.

Perkembangan kawasan permukiman kumuh di daerah perkotaan di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor sosial budaya, urbanisasi, sarana dan prasarana, faktor sosial ekonomi, lahan perkotaan, dan daya tarik perkotaan (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2014 dalam Maresty dan Rini 2019:30). Menurut Rindarjono (2012:128) faktor penyebab adanya permukiman kumuh adalah faktor geografi, faktor ekonomi dan faktor psikologi.

Permukiman kumuh adalah permasalahan yang tak diinginkan keberadaannya, maka dari itu pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2015-2019 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019) telah menetapkan target pengentasan kawasan permukiman kumuh melalui “gerakan 100-0-100”, yakni pencapaian akses air minum 100 % mengurangi kawasan kumuh 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100 % untuk masyarakat. Kawasan permukiman kumuh yang tersebar hampir di setiap kecamatan di Indonesia masih banyak terutama di daerah perkotaan.

Tercatat pada tahun 2019 berdasarkan data kementerian PUPR luas permukiman kumuh 2019 di Indonesia mencapai 87.000 hektar yang sebelumnya 38.000 hektar pada tahun 2014. Pada tahun 2020 pemerintah melalui Direktorat Perkotaan, Perumahan, Permukiman Bapennas dengan kebijakan nasional penanganan permukiman kumuh perkotaan yang telah mengintegrasikan 169 indikator SDGs (*Sustainable Development Goals*) ke dalam RPJMN yaitu kota yang inklusif tanpa kumuh. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini perlu dilakukan agar dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh daerah perkotaan di Indonesia dengan judul “**Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan Di Indonesia**”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor fisik dan faktor sosial budaya penyebab munculnya permukiman kumuh daerah perkotaan di Indonesia.

## METODE

Metode penelitian menggunakan studi literatur yaitu peneliti menelaah secara tekun akan kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian (Nazir, 2014:79). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari referensi seperti studi kepustakaan, buku-buku yang sesuai, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

Hasil dari studi literatur digunakan untuk mencapai semua sasaran dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya permukiman kumuh daerah perkotaan di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor fisik penyebab perukiman kumuh

#### 1. Kondisi kepadatan bangunan

Kepadatan bangunan merupakan total seluruh bangunan di bagi luas wilayah (unit/ha). Ciri kepadatan bangunan dapat diidentifikasi melalui jumlah bangunan yang tinggi, sesak dan padat serta bangun terlihat dominan dikawasan hunian. Parameter kepadatan secara kuantitatif mengacu pada jumlah populasi per hektar. Pada permukiman kumuh tingkat kepadatan bangunan mencapai 250 atau lebih perhektarnya dan memiliki ukuran yang kecil-kecil (Rindarjono, 2012:27).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulkarnaini dan Sari (2019: 179) terkait dengan kepadatan bangunan, menyatakan bahwa kepadatan bangunan di daerah permukiman kumuh tepatnya yang berada di Kota Bukittinggi dikategorikan tinggi karena banyak dijumpai masyarakat migran. Hasil penelitian lainnya dilakukan di Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan memiliki kepadatan tinggi yakni dengan rata-rata setiap gang dihuni sepuluh sampai dua puluh lima KK dengan total ada 199 KK yang tinggal di lorong masjid. Banyaknya jumlah penduduk membuat semakin meningkatnya ruang untuk bermukim, sedangkan kondisi lahan sangat terbatas sehingga tidak ada jarak antar bangunan, terjadi selanjutnya adalah pemadatan bangunan (*densification*) yang mengakibatkan kawasan tersebut jadi kumuh dikarenakan rumah sangat padat dan dibangun secara berdekatan (Putra & Andriana, 2017:473).

Hasil tersebut di atas sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyatakan bahwa permukiman kumuh dapat ditinjau dari tingginya jumlah kepadatan bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan penataan ruang.

#### 2. Kondisi Drainase

Drainase adalah prasarana yang memiliki fungsi untuk menyalurkan air yang berlebihan

dari suatu tempat ke badan air penerima. Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola atau mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT//2014). Karakteristik permukiman kumuh dapat dilihat dari kondisi drainase lingkungannya (PERMEN PU NO 2 Tahun 2016). Pengendalian air yang ada di permukaan agar masyarakat tidak terganggu disebut drainase.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Silvia, 2017: 7) terkait kondisi drainase di permukiman kumuh yang berada dikawasan Gempong Pangong Kecamatan Johan Pahlawan menyatakan bahwa kondisi drainase yang ada masih memiliki kualitas yang kurang baik, masih terlihat sampah yang dan menyebabkan genangan baik di dalam drainase maupun di badan jalan saat intensitas hujan tinggi.

Hasil penelitian lainnya menyatakan hal yang hampir sama yaitu system drainase tidak ada dan system pengendalian banjir juga tidak ada di daerah Belitung Selatan dikarenakan tidak ada jarak antar bangunan serta sempitnya sempadan jalan hingga tidak bisa dibangun selokan yang berfungsi sebagai drainase lingkungan. (Wimardana & Setiawan, 2016:168).

Hal tersebut juga serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan (Putra & Andriana: 2017:475) mengatakan bahwa rendahnya kualitas lingkungan permukiman pada daerah penelitiannya yaitu di Bagan Deli Belawan Kota Medan terutama pada saluran drainase yang dipakai masyarakat untuk membuang sisa buangan rumah tangga sehingga saluran jadi kotor dan menyumbat. Keadaan seperti ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki tempat membuang sampah.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Crysta & Budisusanto (2017:392) terkait kondisi drainase di permukiman kumuh Keputih Kota Surabaya dengan hasil bahwa kualitas drainase daerah yang diteliti teridentifikasi memiliki kualitas yang buruk, hal ini di sebabkan hampir dari seluruh lokasi tersebut tidak terdapat saluran drainase sehingga terputusnya hubungan dengan sistem drainase lainnya sehingga akibatnya air akan tergenang saat hujan deras.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas maka hal ini sejalan dengan karakteristik

permukiman Kumuh Oleh peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas permukiman kumuh yaitu kriteria kekumuhan dapat ditinjau dari kondisi drainase lingkungan dimana drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, drainase tidak terhubung dengan drainase kota, tidak dipelihara dengan baik serta terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya dan kualitas konstruksi bangunan drainase buruk.

### **3. Jaringan Air Bersih**

Kebutuhan manusia yang sangat penting salah satunya adalah air. Kebutuhan rumah tangga harus terlayani oleh air bersih. Aman dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan merupakan syarat dari air bersih. Jaringan air bersih perkotaan di Indonesia pada umumnya dilayani oleh PAM. Berdasarkan standar (SNI 03-1733-2004), setiap 250 orang dapat menggunakan satu kran umum. Kapasitas minimal 30 L/orang untuk setiap harinya.

Hasil penelitian terdahulu terkait jaringan air bersih di daerah permukiman kumuh Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan ditemukan bahwa tidak terdapat fasilitas air PDAM sehingga warga menggunakan sumur bor, bagi masyarakat yang tidak mempunyai sumur bor dengan terpaksa harus membeli dari warga yang mempunyai sumur dengan harga 6000/jam (Putra & Andriana, 2017:475).

Hasil penelitian Crysta & Budisusanto (2017:392) terkait kondisi jaringan air bersih di permukiman kumuh Kelurahan Keputih Kota Surabaya pada daerah penelitiannya yang teridentifikasi memiliki kualitas yang buruk, dikarenakan tidak adanya saluran pipa untuk mencukupi kebutuhan air, karena legalitas tanah yang tidak bisa didirikan jaringan PDAM.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Asa, 2015: 52) yang dilakukan di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan hasil sebagian besar responden tidak terlayani oleh PDAM, yaitu sebesar 66 KK dari total 91 responden. Warga yang tidak memiliki PDAM memperoleh air dengan cara membelinya dari warga yang memiliki PDAM dengan harga RP.500, 00 /drigen 30 L. Keperluan mencuci dan mandi warga menggunakan sumur dan air laut.

Hasil penelitian terdahulu di atas maka hal ini sejalan dengan karakteristik Permukiman Kumuh oleh peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu kriteria kekumuhan dapat dilihat dari tidak tersedianya air bersih yakni ketidak tersediaan air minum yang aman bagi masyarakat serta tidak terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat, merupakan kondisi dimana kebutuhan air masyarakat 60 liter per orang untuk setiap harinya tidak mencapai batas minimum.

#### 4. Jaringan Air Limbah

Limbah dapat digolongkan menjadi 2 yakni limbah cair dan limbah padat. Limbah yang bersumber dari air sisa buangan rumah tangga maupun limpahan air hujan yang tidak terserap tanah disebut limbah cair. Pengelolaan limbah cair yang tepat harus dialirkan melalui sumur resapan dan harus diperhatikan agar tidak mencemari sumber air bersih. Limbah padat merupakan limbah yang berasal dari kakus dan harus dibuang ke dalam *septic tank*.

Hasil penelitian terdahulu terkait jaringan air limbah di daerah permukiman kumuh Kelurahan Keputih Kota Surabaya sebagian besar masih memiliki pengelolaan air limbah yang buruk, hal tersebut karena tidak memiliki *septic tank* baik secara individual maupun komunal untuk penampungan limbah, kondisi MCK baik pribadi maupun MCK umum tidak memenuhi standard dan dalam kondisi yang buruk. (Crysta & Budisusanto 2017:392).

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Asa (2015:54) di permukiman kumuh Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan menunjukkan mayoritas masyarakat belum memiliki MCK yang permanen yakni 51 jiwa atau 56% dan hanya 23 jiwa yang memiliki MCK pribadi yang terhubung septic tank atau 25%, sedangkan 17 jiwa atau 19% menggunakan MCK bersama. Berkaitan dengan tidak adanya lahan untuk membangun MCK pribadi yang ada septic tanknya. Masyarakat banyak yang kurang sadar arti penting adanya MCK, banyak masyarakat yang membuang air besar sembarangan seperti di pantai, tanah kosong, maupun tambak.

Hasil penelitian diatas sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh yang digunakan sebagai kriteria kekumuhan salah satunya dengan melihat kondisi pengolahan air limbah dimana tidak adanya system yang memadai, yakni terhungnya kakus atau closet dengan septic tank baik secara personal, komunal, ataupun terpusat.

#### 5. Persampahan

Sampah merupakan barang buangan dari sisa rumah tangga. Sampah dibedakan menjadi dua yaitu sampah organik contohnya dedaunan, sisa makanan, buahan dan sebagainya serta sampah non organik contohnya kaleng, kaca, plastik, keramik. Prosedur pengelolaan sampah dikerjakan menurut tahapannya, mulai dari sampah dibuang ke tong sampah selanjutnya di angkut dengan gerobak sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) dan setelah itu dipindahkan ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Hasil penelitian terdahulu terkait kondisi persampahan di permukiman kumuh Kelurahan Keputih Kota Surabaya ditemukan mempunyai mutu yang jelek, dikarenakan banyak masyarakat yang tak memiliki tong sampah dan sarana prasarana sampah yang tidak terpelihara dengan baik (Crysta & Budisusanto 2017:392).

Hasil dari penelitian lainnya mengatakan bahwa pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan hanya dilakukan seminggu sekali sehingga sampahnya menumpuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Warga akhirnya membuang sampah sembarangan yakni disekitar rumah mereka atau membuangnya ke laut, fenomena ini terjadi di permukiman kumuh Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan. (Putra & Andriana, 2017:475).

Hasil penelitian diatas sejalan dengan karakteristik permukiman kumuh yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 terkait peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang digunakan sebagai ciri-ciri kumuh dapat dilihat melalui cara pengelolaan sampahnya yakni sarana prasarana sampah yang tidak tepat dengan syarat yang berlaku seperti tempat sampah skala rumah dan skala lingkungan.

## 6. Jaringan Jalan

Prasarana jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jalan memiliki fungsi utama agar memudahkan mobilitas kendaraan dan manusia. Fungsi penting jalan adalah jalur untuk evakuasi darurat. Sistem tingkatan jalan dikelompokkan menjadi enam macam, yakni jalan lokal perimer, jalan lokal sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan arteri primer, jalan arteri sekunder. Menurut SNI 03-6891-2004. Mengenai tata cara perencanaan lingkungan daerah perkotaan, menjelaskan tentang penggunaan jalan sesuai klasifikasinya yaitu pertama Damija (daerah milik jalan), yang ke dua Damaja (daerah manfaat jalan) dan yang ke tiga Dawasja (daerah pengawasan jalan).

Hasil penelitian terdahulu terkait jaringan jalan di Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan yaitu jalan di setiap gangnya hanya memiliki lebar kurang 1,5 m. (Putra & Andriana, 2017:). Hasil penelitian lainnya terkait kondisi jaringan jalan di permukiman kumuh Kelurahan Keputih Kota Surabaya bahwa jaringan jalannya terindikasi kualitasnya jelek, fenomena ini dikarenakan dampak dari perluasan wilayah, dan kondisi jalan yang belum tertata serta banyak yang rusak (Crysta & Budisusanto, 2017: 392).

Hasil penelitian di atas sejalan dengan karakteristik permukiman kumuh yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 mengenai peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang digunakan sebagai kriteria kumuh dilihat dari jalan lingkungannya sebagaimana lingkungan rumah tidak terlayani oleh jaringan jalan atau mutu permukaan jalan yang jelek.

### B. Faktor Sosial, Ekonomi Dan Budaya

#### 1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam menciptakan situasi proses belajar mengajar dengan tujuan membuat peserta didik aktif dalam pengembangan potensinya untuk mempunyai kepribadian, akhlak mulia, kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, keagamaan, ataupun keterampilan yang dibutuhkan bagi peserta didik itu sendiri, masyarakat dan Negara. Pendidikan dapat membantu manusia mendapatkan ilmu dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dengan yang lainnya. Tingkat

pendidikan yang rendah akan mengakibatkan rendahnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat akan pentingnya rumah yang sehat. Kebanyakan yang ditemui pada permukiman kumuh memiliki jenjang pendidikan serta keterampilan yang rendah.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan tingkat pendidikan di permukiman kumuh Belitung Selatan Kota Banjarmasin bahwa sebagian besar penduduknya memiliki jenjang pendidikan yang rendah. Terlihat dengan hasil 60,24% responden yang memiliki status jenjang pendidikan hanya tamatan SD sampai SMP. Kurangnya fasilitas pendidikan serta pelayanan pendidikan yang kurang baik menjadi salah satu penyebab dari hal tersebut. Pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman serta tindakan penduduk yang tinggal di lingkungan permukiman. Penduduk yang memiliki pendidikan yang rendah maka akan mempengaruhi pola berfikirnya dan biasanya acuh terhadap kebersihan lingkungan. Tinggi rendahnya pendidikan juga berdampak pada keadaan perekonomian masyarakat yang menentukan jenis mata pencarian penduduk. (Wimardana & Setiawan, 2016:170).

Penelitian lainnya terkait tingkat pendidikan pada permukiman kumuh juga dilakukan oleh Asa (2015:68) yang dilakukan di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan bahwa tingkat pendidikan penduduk Panggungrejo rendah. Data survey terhadap 91 responden ditemukan bahwa, 55% penduduk pangungrejo hanya tamat Sekolah Dasar, 38 % penduduk tidak lulus pendidikan dasar, dan 7 % lulus pendidikan menengah.

Hasil penelitian tersebut diatas sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh menurut Direktorat Jendral Pembangunan daerah Departemen Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Depdagri dalam Nursyahbani & Pigawati, 2015:270) bahwa ciri-ciri dari permukiman kumuh yaitu sebagian besar penduduknya berpendidikan rendah.

#### 2. Migrasi Masuk

Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan menetap ataupun tinggal sementara di daerah yang baru disebut migrasi. Masyarakat migran yang baru datang tanpa bekal dalam hal pengetahuan, keterampilan dan modal akan menempati ruang-ruang terbuka yang ilegal yang secara umum dalam kondisi yang kumuh.

Hasil penelitian terdahulu terkait migrasi masuk di permukiman kumuh mengatakan bahwa besaran tingkat perpindahan penduduk dari daerah lain menuju daerah permukiman kumuh Belitung Selatan Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh tempat kerja penduduk yang berada di kota tersebut sehingga masyarakat banyak yang memilih pindah (Wimardana & Setiawan, 2016:170).

Hasil penelitian terdahulu di atas sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh yang dikemukakan oleh Sadyohutomo (2008:116) bahwa penghuni permukiman kumuh umumnya berasal dari para migran luar daerah.

### 3. Pendapatan

Pendapatan adalah banyaknya uang yang didapat pekerja baik dari sektor formal maupun sektor informal dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama pada suatu keluarga. Mayoritas penghuni permukiman kumuh pada umumnya memiliki pendapatan kecil, hal ini dikarenakan masyarakat memiliki akses yang terbatas dari lapangan pekerjaan. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat otomatis akan mempengaruhi kemampuan membeli masyarakat tersebut.

Faktor pendapatan memiliki pengaruh terhadap terbentuknya permukiman kumuh juga dikarenakan ketidakmampuan penghuni untuk memperbaiki kualitas bangunan dan lingkungan permukimannya. Penduduk yang memiliki pendapatan rendah biasanya hanya bisa membangun rumah dalam kondisi yang minim. Disisi lain bertambahnya jumlah pendatang mengakibatkan pemerintah tidak mampu menyediakan permukiman yang layak sehingga masyarakat yang tidak memiliki banyak modal akan memilih tinggal di tempat yang tidak layak dan ilegal seperti bantaran rel kereta api, pinggir sungai, dan tempat yang tidak layak lainnya.

Hasil penelitian terdahulu terkait faktor pendapatan di pemukiman kumuh Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan mengatakan bahwa pendapatan masyarakatnya tidak pasti yaitu berkisar dari RP 20.000 - RP .150.000 pendapatan masyarakatnya sangat ditentukan oleh cuaca dan musim saat melaut karena mayoritas penduduknya adalah nelayan. Tidak jarang juga nelayan pulang tanpa membawa hasil. Pendapatan yang rendah, otomatis kemampuan pemilik rumah untuk melakukan perbaikan rumah huniannya sangatlah kecil

kemungkinannya. Memenuhi kebutuhan pangan sangatlah menjadi prioritas utama bagi mereka (Putra & Andriana, 2017:474). Hasil dari penelitian lainnya juga berpendapat hal yang serupa yaitu penghasilan penduduk di kawasan kumuh Belitung Selatan Kota Banjarmasin di bawah UMK, yaitu sekitar 75,90 % responden yang memiliki pendapatan dibawah UMK dan hanya sekitar 24,09% yang memiliki pendapatan diatas UMK (Wimardana & Setiawan, 2016:168).

Hasil penelitian tersebut diatas sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh menurut Direktorat Jendral Pembangunan daerah Departemen Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Depdagri, 2006 dalam Nursyahbani & Pigawati, 2015:270) bahwa ciri-ciri dari permukiman kumuh yaitu sebagian besar penduduknya berpenghasilan rendah.

### 4. Jenis Pekerjaan

Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan memperoleh upah demi untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut pekerjaan. Pekerjaan dibagi menjadi 2 jenis yaitu pekerjaan sektor formal dan sektor informal. Pekerjaan pada sektor formal yaitu pekerjaan yang bekerja di perusahaan sebagai pekerja yang terlatih (*skilled worker*). Para pekerja pada sektor formal mendapat perlindungan hukum yang kuat, memiliki kontrak yang resmi, dan berada dalam organisasi yang berbadan hukum kuat. Contoh pekerjaan formal seperti guru, dokter, polisi, tentara, dan lainnya. Pekerjaan pada sektor informal yaitu jenis pekerjaan yang bertanggung jawab atas perseorangan dan tidak memiliki badan hukum serta hanya berdasarkan kesepakatan. Contoh dari pekerjaan informal adalah petani, pembantu rumah tangga, tukang becak, pemulung, pedagang, dan lainnya.

Hasil penelitian terdahulu terkait faktor jenis pekerjaan di permukiman kumuh Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan adalah sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor informal yaitu nelayan. Pekerjaan tersebut merupakan penyokong pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah tersebut, sebagai penambah penghasilan sebagian nelayan juga mencari pekerjaan sampingan seperti buruh panggul, jemur ikan, cari kerang dan lain sebagainya (Krisnajayanti, 2016:98).

penelitian yang serupa dilakukan oleh Alfiani (2016:11), dengan hasil bahwa

karakteristik responden berdasarkan pekerjaan di permukiman kumuh Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yaitu paling banyak sebagai pemulung dan pengemis yakni sebesar 54,9% yang berarti bahwa kebanyakan responden bekerja pada sektor informal. Hasil yang sama pada permukiman kumuh Bagan Deli belawan kota medan bahwa sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal yaitu sebagai nelayan sedangkan para perempuannya bekerja sebagai ibu rumah tangga. (Putra & Andriana, 2017:474).

Hasil penelitian tersebut diatas sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh menurut Direktorat Jendral Pembangunan daerah Departemen Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Depdagri, 2006 dalam Nursyahbani & Pigawati, 2015: 270) bahwa ciri-ciri dari permukiman kumuh yaitu sebagian besar masyarakatnya berusaha atau bekerja pada sektor informal.

#### 5. Extended Family System

*Extended family system* adalah suatu system yang dianut oleh penghuni permukiman kumuh dalam kebiasaan mereka yang saling tolong menolong untuk menampung family atau para pendatang yang baru datang ke kota. Jalinan kekeluargaan yang amat kuat karena adanya jalinan antara penolong dan yang di tolong. Kuatnya jalinan tolong menolong ini tidak terbatas pada berapa jumlah orang yang di tampung, mereka selalu menyediakan tempat untuk mereka tinggal (Rindarjono, 2012:194). *Extended Family system* ini merupakan proses pemadatan permukiman secara internal yaitu dengan penambahan ruang tanpa menambah luas bangunan tempat tinggal guna menampung anggota keluarga baru. Penambahan ruang dilakukan dengan menambah sekat-sekat baru di dalam rumah.

Hasil penelitian terdahulu terkait *Extended Family system* ini menyebutkan bahwa masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh Kota Semarang mereka tinggal dalam rumah petak-petak atau ada rumah yang cukup besar tetapi dihuni oleh banyak keluarga. Rumah-rumah ini sebagian besar tidak memiliki WC ataupun kamar mandi, sehingga keberadaan MCK umum sangat vital, bahkan ada beberapa keluarga yang menggunakan dapur secara bersama-sama. Kondisi fisik seperti ini mengakibatkan hubungan antar sesama warga semakin erat. Rumah yang kecil-kecil dan

sempit mengakibatkan seluruh anggota keluarga berkumpul di dalam rumah hanya pada saat tidur saja. Seluruh kegiatan sebagian besar dilakukan di luar rumah. Sifat *outdoor personality* atau orang yang lebih menyukai aktivitas di luar rumah merupakan salah satu kebiasaan yang melekat pada permukiman kumuh (Rindarjono, 2012:152)

Hasil penelitian diatas sesuai dengan teori karakteristik permukiman kumuh yang dikemukakan oleh Ridlo (2001:24) yang menyatakan bahwa penduduk yang berada di permukiman kumuh masih memiliki perilaku kehidupan desa yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat.

## PENUTUP

### Simpulan

Dari berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan faktor-faktor penyebab munculnya permukiman kumuh antara lain faktor fisik dan faktor sosial, ekonomi, serta budaya. Faktor fisik terdiri dari kepadatan bangunan, kondisi drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, persampahan, jaringan jalan. Faktor sosial, ekonomi dan budaya terdiri dari tingkat pendidikan, migrasi masuk, pendapatan, jenis pekerjaan, beban tanggungan, dan *extended family system*.

### Saran

#### 1. Bagi pemerintah

Perlu adanya perubahan paradigma yang menyatakan bahwa masyarakat miskin perkotaan sebagai masalah. Sebenarnya keberadaan mereka memiliki potensi untuk menunjang kemajuan sebuah kota. Masyarakat ini kerap dijuluki sebagai debu emas dari ekonomi kota. keberadaan masyarakat miskin kota ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi keberlangsungan kota. Oleh karena itu diharapkan pemerintah mampu menyusun kebijakan terkait keberadaan permukiman kumuh melalui perencanaan strategis penanganan pemukiman kumuh dengan melihat keadaan permukiman tersebut dan alternative perencanaan di masa yang akan datang, serta harus benar-benar direalisasikan agar permukiman kumuh perkotaan dapat diminimalisir keberadaanya.

#### 2. Bagi masyarakat

Dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa sadar akan pentingnya menjaga lingkungan permukiman dan memperhatikan kualitas tempat tinggalnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afiani, Vinny. 2016. *"Persepsi Masyarakat Terkait Kenyamanan Tinggal Di Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)"*. Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya.
- Asa, Diana Margaretha. 2015. *"Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan"*. Teknik Sipil Dan Perencanaan. Institut Teknologi Nasional Malang.
- Crysta, E. A., & Budisusanto, Y. (2017). Identifikasi permukiman kumuh berdasarkan tingkat RT dikelurahan keputih kota surabaya. *Teknik ITS*, 6(2), 2337-3520. Retrieved September 4, 2019, from <http://ejurnal.its.ac.id/>
- Krisnajayanti, Fitri. 2016. *"Kajian Pemukiman Kumuh di kawasan Pesisir Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan"*. Ilmu Sosial Dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya: Surabaya.
- Maresty, K. Astuti, W. & Rini, E.F. 2019. Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. *Jurnal UNS*. 1(1). 24-33.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nursyahbani, R & Pigawati, B. 2015. Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Jurnal Teknik PWK*. 4(2). 267-281.
- Praytno, Budi. 2014. *"Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta"*
- Ridlo, Agung Mohammad. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan Semarang*. Semarang: Unissula Press.
- Rindarjono, Muhammad Gamal. 2012. *Slum: Kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Media Perkasa
- Putra, K. E & Andriana, M. 2017. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan. *Jurnal Koridor*. 8(2). 97-104. Diakses pada tanggal 4 November 2019
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silvia, C. s. 2017. Identifikasi Karakteristik Dan Pemetaan Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan. *teknik sipil*, 3(4), 1-12.
- Wimardana, A. S & Setiawan, R. P . 2016. Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan, Kota Banjarmasin. *Jurnal Teknik ITS*. 5(2). 2337-3539. <http://ejurnal.its.ac.id/>. Diakses tanggal 4 November 2019.
- Zulkarnaini, W R dan Sari, D T. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi. *Jurnal Planologi*. 16(2). 169-188.